

**MANAJEMEN LOGISTIK
BANTUAN BENCANA BANJIR OLEH DINAS SOSIAL
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH**

Evan Oxtyn Habeahan
NPP : 31.1008

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email : eoxtyn@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. M. Amin, MM, M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The management of flood disaster relief logistics is very dependent on how disaster management actors, both institutions and government agencies, implement logistics management for disaster relief assistance. Logistics is the most important element in any humanitarian aid effort, and how we manage the logistics of humanitarian aid will determine whether a disaster management operation is a success or failure. Purpose:* *This study aims to find out and analyze how the implementation of logistics management for flood disaster assistance by the Social Service of Mimika Regency by paying attention to how the process of distributing logistics assistance is fast, precise and procedural and how the minimum standard for logistical assistance for flood disasters is applied. Method:* *This research uses descriptive qualitative method. The data obtained is through interviews and observations which are then analyzed using a deductive mindset. The data is referred to based on the results of interviews with employees and staff at the Social Service as well as through observations of activities in the field. The data obtained are then presented, analyzed, reduced and then drawn conclusions. Result:* *The results of this study indicate that the logistics management of flood disaster assistance carried out by the Social Service of Mimika Regency is categorized as good, it is based on the application of a good management system, procedural distribution mechanism and the logistical assistance provided is in accordance with applicable minimum standards. Conclusion:* *The conclusion is that the flood disaster logistics management process by the Mimika Regency social services has gone well. However, there are still obstacles and constraints in its distribution, including difficult to reach areas affected by the flood disaster, unhealthy political conditions in the Mimika Regency Government and poor coordination with the various agencies involved in the logistics distribution process.*
Keywords: *Logistics, Management, Disaster*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pengelolaan logistik bantuan bencana sangat bergantung pada bagaimana para pelaku penanggulangan bencana baik itu lembaga maupun instansi pemerintahan dalam menerapkan manajemen logistik bantuan penanggulangan bencana. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan, dan bagaimana cara kita mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau gagal. Tujuan:* *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan manajemen logistik bantuan bencana banjir oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika dengan memperhatikan bagaimana proses pendistribusian bantuan logistik yang cepat tepat dan prosedural serta bagaimana standar minimum bantuan logistik bencana banjir yang diterapkan. Metode:* *Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh adalah melalui wawancara dan observasi dimana selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Data tersebut di*

dirujuk berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai dan staf di Dinas Sosial serta melalui observasi kegiatan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik kesimpulan. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen logistik bantuan bencana banjir yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mimika terkategori baik, hal tersebut berdasarkan pada kegiatan sistem manajemen yang baik, mekanisme pendistribusian yang prosedural serta bantuan logistik yang diberikan sudah sesuai dengan standar minimum yang berlaku. **Kesimpulan:** Adapun kesimpulannya bahwa proses manajemen logistik bencana banjir oleh dinas sosial Kabupaten Mimika telah berjalan dengan baik. Namun, masih ada hambatan dan kendala dalam pendistribusiannya, antara lain jangkauan yang sulit dicapai dari daerah yang terdampak bencana banjir, kondisi politik yang tidak sehat di Pemerintahan Kabupaten Mimika serta koordinasi yang masih kurang terjalin dengan berbagai instansi yang terlibat dalam proses pendistribusian logistik.

Kata kunci: Logistik, Manajemen, Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Pengelolaan logistik merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk menunjang kehidupan para masyarakatnya terlebih khusus untuk masyarakat yang terdampak dari bencana. Pengelolaan logistik dalam bantuan bencana sangat bergantung pada bagaimana para lembaga maupun instansi pemerintahan dalam menerapkan manajemen logistiknya. Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan, dan bagaimana cara kita mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau gagal (Van Wassenhove, 2006).

salah satu dari tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, oleh karena itu setiap lembaga atau instansi negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan karena bencana wajib memiliki regulasinya masing-masing terkait dengan manajemen logistik dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia.

Kabupaten Mimika merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang terletak di wilayah pantai selatan dimana Mimika dulunya merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Fakfak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur memiliki luas sekitar 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dan terletak antara 137°48'49.68" Bujur Timur hingga 134°52'21.36" Bujur Timur dan 4°2'5.64" Lintang Selatan hingga 5°14'13.56" Lintang Selatan.

Berdasarkan hasil analisis data spasial, wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Keadaan topografi Kabupaten Mimika ditandai dengan 5 (lima) kelas kemiringan lereng, yaitu: 0-8% (datar), 8-15% (landai), 15-25% (agak curam), 25-40% (curam), dan >40% (sangat curam). Sebagian besar wilayah Mimika didominasi oleh topografi datar dengan kelerengan 0-8%. Klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Mimika dibagi ke dalam lima kelas ketinggian yaitu: 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 1.500 mdpl, 1.500 – 2.000 mdpl, dan ketinggian diatas 2.000 mdpl. Titik lokasi tertinggi di wilayah Kabupaten Mimika berada pada ketinggian 5.000 mdpl. Daerah dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl tersebar di wilayah utara pada Distrik Agimuga, Jila, Tembagapura, Mimika Barat, Mimika Tengah dan Mimika Barat Jauh. Dataran rendah dengan ketinggian di bawah 1.000 mdpl

mendominasi daerah-daerah di wilayah selatan sampai ke daerah pesisir. Kabupaten Mimika merupakan daerah yang memiliki julukan daerah terbasah yang ada di Indonesia bahkan dunia karena curah hujan yang tinggi.

Dampak dari bencana sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mimika dan seluruh korban pasti sangat berduka atas kehilangan harta benda dan kehilangan orang-orang tercinta. Namun di luar itu, salah satu kelompok masyarakat yang paling menderita adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah atau kelompok terpinggirkan.

terdampak golongan prasejahtera atau menengah kebawah.

Kegiatan organisasi pemerintah seperti Dinas Sosial Kabupaten Mimika memerlukan manajemen yang baik untuk memberikan kerangka organisasi pembentukan tim kerja, dalam hal ini memberikan bantuan logistik kepada korban bencana banjir. Manajemen yang baik akan mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan dengan memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada, sehingga meningkatkan produktivitas kinerja organisasi.

Manajemen logistik yang memerlukan upaya kolaboratif dengan menuntut setiap pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan manajemen logistik kebencanaan harus berpartisipasi aktif dalam bekerjasama baik secara internal maupun secara eksternal atau diluar organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Setiap kegiatan yang mereka laksanakan dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga dalam praktiknya proses penyelenggaraan manajemen logistik mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian hingga penghapusan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai yaitu dengan memberikan pelayanan sosial dalam bentuk bantuan logistik dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dampak dari bencana sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mimika dan seluruh korban pasti sangat berduka atas kehilangan harta benda dan kehilangan orang-orang tercinta. Namun di luar itu, salah satu kelompok masyarakat yang paling menderita adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah atau kelompok terpinggirkan. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan mereka ketika bencana benar-benar menimpa mereka, ketika mereka harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Mereka adalah sekelompok orang yang membutuhkan dukungan dan bantuan pemerintah untuk bertahan hidup dalam keadaan luar biasa. Bantuan berupa kebutuhan hidup sehari-hari hendaknya diatur melalui proses dan mekanisme yang baik yang disebut administrasi. Masyarakat yang terkena dampak dari bencana banjir ini sendiri sebagian besar adalah masyarakat menengah kebawah yang jika terjadi bencana banjir maka sangat mempengaruhi mata pencarian mereka sehingga perlunya perhatian bantuan logistik yang diberikan pemerintah kepada mereka. Bantuan yang diberikan di beberapa wilayah kepada masyarakat yang terdampak masih ada yang terlambat sehingga menjadi permasalahan terlebih khusus bagi masyarakat terdampak golongan prasejahtera atau menengah kebawah.

Manajemen logistik yang memerlukan upaya kolaboratif dengan menuntut setiap pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan manajemen logistik kebencanaan harus berpartisipasi aktif dalam bekerjasama baik secara internal maupun secara eksternal atau diluar organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Setiap kegiatan yang mereka laksanakan dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga dalam praktiknya proses penyelenggaraan manajemen logistik mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian hingga penghapusan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai yaitu dengan memberikan pelayanan sosial dalam bentuk bantuan logistik dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dirhamsyah, M., & Abubakar, Y. (2017). *Model Pemantauan Persediaan Logistik Kebencanaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir Tahunan di Kabupaten Aceh Tamiang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi bencana tahunan, persediaan logistik bencana tahunan harus memperhitungkan waktu yang tepat dengan melihat data klimatologi yang didapatkan dari instansi terkait seperti BPBD dan BMKG supaya data-data yang didapatkan dapat mendukung kegiatan penyediaan kelogistikan bencana. Standar umum jumlah logistik perhitungannya menggunakan metode Economic Order Quantity yang secara spesifik menjelaskan takaran kebutuhan standar umum dan standar khusus jumlah logistik kebencanaan. Dalam melakukan pemodelan pemantuan persediaan logistik pemerintah daerah merupakan aktor utama mendukung sarana prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan yang dibutuhkan.

Hartati, R (2014). *Analisis distribusi Bantuan Logistik Bencana Alam Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian Logistik Bencana yang selama ini dilakukan ternyata pengaruhnya tidak begitu besar terhadap masyarakat karena sering terjadinya keterlambatan akibat manajemen yang kurang efektif. Selain itu pentingnya peran informasi menjadi sangat penting dalam aktivitas pendistribusian barang dan bantuan logistik seperti obat-obatan. Kegiatan pemantauan harus terus dilaksanakan agar pendistribusian bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas bantuan bagi korban bencana.

Megawati, R (2013). *Santunan dan Bantuan Korban Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen kuat pemerintah dalam memberikan santunan dan bantuan korban bencana sangatlah nyata dengan dibuatnya Peraturan Bupati untuk menyelenggarakan hal tersebut, hal ini tentunya mendukung adanya alokasi anggaran yang memadai untuk membantu korban bencana akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada faktor yang menghambat seperti panjangnya jalur birokrasi dan rumitnya mekanisme yang harus dilalui. Hal tersebut perlu dievaluasi sekaligus dilakukan pengoptimalan agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan lancar.

Oktarina, R (2008). *Pemetaan Sistem Informasi Manajemen Logistik Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar untuk merancang system informasi logistik penanggulangan bencana yang diharapkan dapat mengkoordinir semua pelaku pada aktivitas logistik dan pendistribusian barang bantuan penanggulangan bencana.

Lestari, P. B., & Haksama, S. (2017). *Analisis Fungsi Manajemen Logistik di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Manajemen Logistik di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan keluarga Berencana (KB) kota Surabaya sudah berjalan dengan baik kecuali pemusnahan logistik.

PARIPURNO, E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). *Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari Tahun 2017*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan bencana banjir pada saat tanggap darurat di Kota Kendari sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana operasi. Pengorganisasian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PPserta TNI/POLRI. Pada proses pelaksanaannya, ada koordinasi secara rutin yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Pemda Kota Kendari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Kota Kendari, BPOM, SATPOL PP serta TNI/POLRI. Proses evaluasi oleh Pemda Kota Kendari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berjalan rutin.

Mandasini, A. A., Andriani, B., & Ramlawati, R. (2023). *Analisis Pelaksanaan Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Di Bpbd Kabupaten Mamuju Tengah*. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Mamuju Tengah sudah dilaksanakan, tetapi belum seperti yang seharusnya. Peningkatan dapat dilakukan dengan pengadaan fasilitas gudang yang baik, pengadaan mobil tangki, dan menambah SDM operator kebencanaan.

Hardiyani, T. R. (2023). *Penerapan Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Korban Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pati*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati telah menerapkan manajemen logistik secara optimal dalam proses pendistribusiannya saat terjadi bencana. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati telah menerapkan manajemen logistik pada setiap kegiatan pendistribusian pada korban bencana alam. Terdapat beberapa kendala terutama saat aktivitas keluar masuknya barang yang tidak sesuai antara pencatatan laporan dan stoknya di gudang yang tidak sinkron. Namun, masalah tersebut dapat teratasi dengan dilakukannya pengecekan berulang kali secara maksimal. Sehingga bantuan logistik dapat didistribusikan tepat waktu dan sasaran pada korban bencana alam.

Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana berpedoman dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggap darurat bencana tersebut meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, program pengurangan sumber daya manusia, program pengurangan peralatan dan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban, dan pemulihan dini. Yang telah dilakukan dengan baik dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait agar penanggulangan bencana dapat berjalan lancar.

Asy'ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). Hasil penelitian dampak sosial ekonomi pasca bencana di Kabupaten Pamekasan adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang daerah rawan bencana serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu **MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA BANJIR OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH**

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut bagaimana manajemen logistik bencana banjir oleh Dinas Sosial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disusun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini berlandaskan dasar hukum yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan pemberian bantuan logistik terhadap korban yang terdampak bencana. Fokus penelitian adalah pentingnya manajemen logistik bencana banjir secara cepat dan tepat. Selain itu, penelitian juga mengkaji bagaimana proses manajemen logistik yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mimika, meliputi proses perencanaan hingga proses pengendalian.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Arikunto, 2005). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri Yusuf, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif ini ditunjukkan ini membuat deskripsi relasi dari sebuah peristiwa agar peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai fenomena yang akan diteliti oleh peneliti, menurut (Sukmadinata, 2007).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Nurdin Ismail, 2019). Penelitian kualitatif ini peneliti gunakan dengan diperkuat teori mengenai pengertian penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (2009) yang mengatakan bahwa “Qualitative research is situated activity that locates the observer in the world”, Artinya peneliti menguraikan bahwa penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln ini lebih mengedepankan pengamatan sehingga diperlukannya peran para ahli dalam melakukan penelitian di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Logistik Bantuan Bencana Banjir

Menurut buku dasar-dasar manajemen dari Brantas (2009:3) manajemen yang dibutuhkan manusia karena manajemen dapat berfungsi sebagai alat untuk mengakomodir dan menggerakkan sebuah sumberdaya. Dengan adanya kegiatan manajemen maka suatu kegiatan dapat berjalan lancar dengan efektif dan efisien dengan menggunakan system kerja yang sesuai dengan tujuan sebuah organisasi.

Manajemen logistik digunakan karena pentingnya pengelolaan peralatan dan perlengkapan secara tertib, sehingga dapat tercapainya asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya manajemen logistik dalam suatu organisasi maka akan mempermudah proses penyaluran barang ataupun lainnya secara efektif dan efisien dari segi material dan waktu.

3.1.1 Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

perencanaan dan penentu kebutuhan logistik berjalan bersama dan didasarkan oleh kajian-kajian potensi bencana yang kira-kira dapat terjadi dan memperkirakan kebutuhan apa yang diperlukan sekiranya apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Dinas sosial kabupaten Mimika juga berpedoman kepada dokumen perencanaan tahun lalu dengan mengevaluasi kebutuhan dari tahun ke tahun.

3.1.2 Penganggaran

Peran kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial sangatlah penting dengan terlibat langsung dalam penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kepala bidang harus mampu menganalisis rencana pendapatan dan belanja untuk tiap-tiap program yang akan dikerjakan di tahun anggaran saat itu. Sebagai contoh kepala bidang mengusulkan peningkatan terhadap biaya perawatan sarana dan prasarana supaya dapat mendukung proses penyaluran bantuan bencana kepada masyarakat. Biaya perawatan tersebut kemudian dirincikan melalui beberapa item. Hasil dari usulan kepada kepala dinas membuat RKA-SKPD yang akan masuk dalam anggaran tahun tersebut. Proses pengusulan tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah ketepatan program yang dianggarkan dengan anggaran yang tersedia di tahun itu.

3.1.3 Pengadaan

Pengadaan barang untuk operasional dinas sosial kabupaten Mimika ini dilaksanakan tiap tahun dan pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan dan proses pengadaan juga terdapat SOP yang berlaku di Kabupaten Mimika. Pengadaan perlu dilakukan agar apa yang menjadi kekurangan dalam membantu penyaluran barang atau yang menjadi kekurangan barang pada tahun sebelumnya dapat teratasi.

3.1.4 Penyimpanan dan Penyaluran

Dinas Sosial Kabupaten Mimika sudah mempunyai tempat penyimpanan logistik yang memadai dan juga secara berkala selalu dicek kondisi barangnya. Namun dalam proses penyalurannya dinas sosial kabupaten Mimika belum mampu dalam mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak yang berada dipedalaman dan pesisir karena akses yang kurang dan koordinasi yang tidak berjalan baik, sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat waktu.

3.1.5 Pemeliharaan

Proses pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan terhadap barang logistik atau kebutuhan logistik yang sudah ada baik itu operasional maupun barang yang ada digudang seperti yang sudah ada di sub bab sebelumnya.

3.1.6 Penghapusan

Penghapusan dilaksanakan guna barang yang didistribusikan tidak cacat dan layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya penghapusan oleh yang bertanggungjawab. Barang yang akan dihapuskan akan melalui tahapan proses dan harus dicek kelayakan barang tersebut. Semua barang pasti mempunyai waktu atau masa pemakaiannya, untuk menjaga agar barang yang tersalurkan dalam kondisi baik perlu adanya penghapusan untuk barang yang sudah tidak layak lagi. Oleh karena itu proses penghapusan harus berjalan dengan baik.

3.1.7 Pengendalian

Fungsi terakhir ini yang dikemukakan oleh M. S Subagya dalam buku Manajemen Logistik adalah Pengendalian, pengendalian yang dimaksud adalah proses mengendalikan, memonitoring, mengawasi, mengamankan dan mengevaluasi semua kegiatan dalam manajemen logistik. Pengendalian merupakan dimensi yang penting, karena tanpa adanya pengendalian yang baik maka tujuan akhir suatu organisasi akan sulit tercapai.

Pengendalian dalam manajemen sektor publik, terutama dalam manajemen logistik bantuan bencana, dilakukan sebagai kegiatan yang mengawasi dan melaporkan kegiatan. Mengatur kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi adalah fungsi utama pengendalian. Namun, ini tidak berarti semua kegiatan harus sesuai dengan rencana saat ini karena pengendalian ini sifatnya berubah seiring dengan waktu dan rencana. Akibatnya, tujuan utama dari kegiatan pengendalian ini adalah memastikan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial memenuhi tujuan yang diinginkan.

3.2 Manajemen yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sebagai salah satu instansi perangkat daerah yang bergerak di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Mimika harus mematuhi nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam setiap operasinya sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas adalah beberapa indikator pemerintahan yang baik. Ini berkaitan dengan manajemen logistik, yaitu

bagaimana hal itu dapat dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan juga akuntabel. Pegawai Dinas Sosial menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dengan melaporkan setiap kegiatan melalui mekanisme pelaporan yang telah ada sebelumnya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan dengan benar.

3.3 Hambatan Dalam Proses Pendistribusian Bantuan Bencana Banjir

Dalam manajemen logistik salah satu kegiatan yang menjadi kunci keberhasilan dari manajemen tersebut adalah kegiatan pendistribusian atau penyaluran, hal itu menjadi sangat penting karena proses pendistribusian ini terjadi di saat dan pasca bencana, artinya kegiatan ini selalu berpacu terhadap waktu, kondisi dan tekanan.

Hasil observasi dari peneliti menunjukkan bahwa sarana yang mendukung tercapainya pendistribusian bantuan logistik sangat memadai. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah Upaya teknis bagaimana mempersiapkan seluruh sarana tersebut dengan tanggap melalui pengorganisasian dan koordinasi bersama semua pihak demi kelancaran kegiatan pendistribusian atau penyaluran bantuan logistik. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pendistribusian logistik sehingga tidak tepat waktu antara lain :

1. Lokasi yang sulit dijangkau dan jauh menjadikan proses pendistribusian menjadi terhambat. Hal ini menjadi hambatan dikarenakan dalam proses pendistribusian perlu adanya kematangan dari segi infrastruktur yang dibangun.
2. Koordinasi yang kurang juga menjadi hambatan karena pada hakikatnya proses pendistribusian ini tidak dapat berjalan baik jika hanya dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten Mimika sendiri. Faktor yang terpenting dalam koordinasi adalah komunikasi yang dilakukan baik secara vertical maupun horizontal dan keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak yang bekerjasama dalam proses pendistribusian bantuan logistik.
3. Kondisi politik yang tidak sehat di pemerintahan kabupaten Mimika ini juga menjadi hambatan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran dari internal dinas sosial yang hanya berfokus terhadap arus politik tanpa memikirkan apa yang harus disediakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

3.4 Strategi Penyaluran Logistik Bantuan Bencana yang Cepat dan Tepat

Cepat atau tidaknya bantuan logistik dipengaruhi oleh aspek koordinasi. Koordinasi adalah hal yang harus dilakukan terutama di lapangan agar semua pihak turut berperan serta dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya koordinasi secara vertikal atau atas ke bawah tetapi juga koordinasi secara horizontal juga, yang artinya sejajar dengan pihak-pihak lain yang turut berperan dalam pendistribusian bantuan logistik.

Dalam manajemen logistik, koordinasi menjadi bagian penting jalannya suatu kegiatan yaitu melalui pendelegasian tugas ke pihak lain dan pembagian pekerjaan baik sesama atau antar instansi. Koordinasi yang dijalankan harus bersifat dinamis dan bukan statis karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan, tujuannya adalah untuk mengerahkan dan menyatukan semua Tindakan serta pikiran kearah tercapainya sasaran kegiatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hambatan yang dimiliki dinas sosial Kabupaten Mimika adalah lokasi terjadinya bencana banjir yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses penyalurannya. Berdasarkan observasi peneliti juga mendapatkan bahwa koordinasi yang tidak berjalan dengan baik oleh berbagai pihak baik dengan masyarakat dan juga pihak yang terlibat lainnya serta kondisi politik yang tidak sehat di pemerintahan kabupaten Mimika. Hal tersebut sama seperti temuan dari penelitian Trisna Rudy Hardiyani, (2023) yang sama-sama menemukan bahwa jarak yang sulit dijangkau membuat terhambatnya pengiriman logistik Ketika terjadi bencana.

IV. KESIMPULAN

Proses manajemen logistik bantuan bencana banjir telah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Mimika telah menyelesaikan setiap tahap manajemen sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, dan semua indikator dari 7 masalah telah terpenuhi. Namun masih terdapat beberapa yang tidak tepat waktu dalam proses pendistribusiannya, hal tersebut dikarenakan jangkauan yang sulit bagi dinas sosial kabupaten Mimika dalam penyalurannya. Hambatan yang dimiliki dinas sosial Kabupaten Mimika adalah lokasi terjadinya bencana banjir yang sulit terjangkau sehingga menghambat proses penyalurannya. Berdasarkan observasi peneliti juga mendapatkan bahwa koordinasi yang tidak berjalan dengan baik oleh berbagai pihak baik dengan masyarakat dan juga pihak yang terlibat lainnya serta kondisi politik yang tidak sehat di pemerintahan kabupaten Mimika. Hasil wawancara menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten mimika agar manajemen logistik dapat berjalan cepat dan tepat adalah dengan koordinasi berbagai pihak. Karena koordinasi yang baik akan menciptakan kinerja yang optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada distrik yang sulit dijangkau di Kabupaten Mimika saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan focus penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti akan mengevaluasi lebih lanjut terhadap manajemen logistic bantuan bencana banjir yang telah diimplementasikan, analisis data masyarakat terdampak bencana untuk menentukan kebutuhan masyarakat terdampak dan studi kasus dari beberapa komunitas terdampak untuk memahami dinamika lokal dan tantangan spesifik dalam proses penanganan manajemen logistik.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Mimika dan Dinas terkait atas kerja keras dan dedikasinya dalam menangani dan mendukung upaya penelitian ini. Semoga kerjasama kita terus berlanjut untuk meningkatkan pemahaman dan penanganan terhadap manajemen logistik bencana banjir di masa depan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 247.
- Asy'ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(2), 153-168. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/J-MACC/article/view/1186>
- Brantas. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Dirhamsyah, M., & Abubakar, Y. (2017). Model Pemantauan Persediaan Logistik Kebencanaan Dalam Menghadapi Bencana Banjir Tahunan di Kabupaten Aceh Tamiang. <https://jurnal.usk.ac.id/JIKA/article/view/13341>
- Hardiyani, T. R. (2023). *Penerapan Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Korban Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pati*. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/15357/2/COVER_Triska%20Rudy%20Hardiyani.pdf
- Hartati, R. (2014). Analisis distribusi Bantuan Logistik Bencana Alam Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/4166/>
- Lestari, P. B., & Haksama, S. (2017). Analisis Fungsi Manajemen Logistik di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. *Jurnal*

- Lincoln, D. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar
- Mandasini, A. A., Andriani, B., & Ramlawati, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Di Bpbd Kabupaten Mamuju Tengah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6073>
- Megawati, R. (2013). Santunan Dan Bantuan Korban Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 1470-1484.
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Rizki%20Megawati%20\(11-14-13-04-39-47\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Rizki%20Megawati%20(11-14-13-04-39-47).pdf)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Oktarina, R. (2008). Pemetaan Sistem Informasi Manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia. <https://repository.widyatama.ac.id/items/8088131c-7156-4718-8d1b-ae0cc4ce3a5d>
- PARIPURNO, E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir: studi kasus tanggap darurat bencana di kota kendari tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 25-38.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/418>
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5), 21-35.
<https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/252>
- Subagya, M. S. (1927) *Manajemen Logistik*. Jakarta: PT Tema Baru.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. *Journal of the Operational research Society*, 57(5), 475-489.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/palgrave.jors.2602125>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan/A. Muri Yusuf.
https://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10637&keywords=

B. WEB

- BPS Mimika. Mimika Dalam Angka 2022. mimikab.beta.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Januari 2024.